

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS LAPANGAN DWIWARNA)

Mery Dwi Wulandari¹, Muhamad Arsyad², Saidah Hasbiyah³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: merydwlnr1@gmail.com

ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha. Fenomena masalah yang terjadi yaitu rendahnya kepatuhan pedagang kaki lima terhadap Peraturan Daerah, tidak mengetahui dan memahami tujuan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan PKL dan sikap aparat dalam menegakkan peraturan yang cenderung kurang tegas dan tidak konsisten dapat ditemukan bahwa penertiban seringkali tidak dilakukan secara merata. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi pengelolaan PKL dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi pengelolaan PKL di Lapangan Dwiwarna Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil menggunakan teknik *snowball sampling* dengan jumlah informan sebanyak 10 orang. Data yang telah terkumpul, dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan *Conclusion Drawing/Verification*. Uji kredibilitas data yang digunakan berupa triangulasi subjek, triangulasi waktu dan triangulasi teknik.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pedagang kaki lima (PKL) cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dari: *Pertama*, sosialisasi cukup optimal, karena sudah tersosialisasikan kepada PKL. *Kedua*, jelas kurang optimal, karena penyampaian informasi tidak menyeluruh. *Ketiga*, tepat cukup optimal, karena sudah berjalan dalam penegakan peraturan. *Keempat*, konsisten kurang optimal, karena penyampaian jam operasional dan pengawasan tidak konsisten. *Kelima*, staf cukup optimal, karena dalam pelaksanaannya sudah tercukupi. *Keenam*, informasi sudah cukup optimal, karena tersampaiakannya dalam hal ketertiban dan kepatuhan. *Ketujuh*, wewenang sudah cukup optimal, karena pelaksanaannya sudah berjalan sesuai tugas pokoknya. *Kedelapan*, fasilitas kurang optimal, dalam hal saran dan prasarana kebutuhan seperti tenda. *Kesembilan*, memahami tugasnya cukup optimal, karena satpol PP sudah memahami dan melaksanakan tugasnya dengan baik. *Kesepuluh*, mampu melaksanakan sudah cukup optimal, karena satpol PP sudah menjalankan tugasnya dalam menjalin komunikasi kepada masyarakat dan pedagang. *Kesebelas*, *standar operasional prosedur (SOP)* sudah cukup optimal, karena satpol PP memiliki SOP yang baik untuk pengarahan dan pembinaan kepada pedagang. *Keduabelas*, keinginan melaksanakan sudah cukup optimal, karena satpol PP sudah menegakkan peraturan maupun penertibannya. Faktor pendukung yaitu keinginan untuk tertib pedagang dan dukungan dalam tindakan untuk keberlangsungan aktivitas PKL. Faktor penghambat yaitu komunikasi yang tidak menyeluruh dan minimnya untuk fasilitas bagi pedagang kaki lima yang ada di lapangan dwiwarna.

Saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi secara menyeluruh dan menyediakan fasilitas yang representative dan mendukung untuk aktivitas PKL. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan untuk meningkatkan konsistensi dalam penegakan peraturan.

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan Pedagang

ABSTRACT

Street Vendors (PKL) are one of the people's economic businesses engaged in the informal sector trade business which is the embodiment of people's rights in doing business. The problem phenomenon that occurs, namely the low compliance of street vendors with Regional Regulations, not knowing and understanding the purpose of Regional Regulations regarding street vendor management and the attitude of the apparatus in enforcing regulations that tend to be less firm and inconsistent, it can be found that the control is often not carried out evenly. The purpose of this study is to find out the implementation of street vendor management and the factors that affect the implementation of street vendor management in the Dwiwarna Field, Hulu Sungai Tengah Regency.

This study uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The data source was taken using the snowball sampling technique with a total of 10 informants. The data that has been collected is analyzed using data reduction techniques, data presentation and Conclusion Drawing/Verification. The data credibility test used was in the form of subject triangulation, time triangulation and technique triangulation.

The results of the study show that the management of street vendors (PKL) is quite optimal. This can be seen from: First, socialization is quite optimal, because it has been socialized to street vendors. Second, it is clearly less than optimal, because the delivery of information is not comprehensive. Third, it is quite optimal, because it has been running in regulatory enforcement. Fourth, consistency is less than optimal, because the delivery of operating hours and supervision is inconsistent. Fifth, the staff is quite optimal, because the implementation has been sufficient. Sixth, the information is quite optimal, because it is conveyed in terms of order and compliance. Seventh, the authority is quite optimal, because its implementation has been carried out according to its main duties. Eighth, facilities are less than optimal, in terms of suggestions and infrastructure needs such as tents. Ninth, understanding the task is quite optimal, because the Satpol PP has understood and carried out its duties well. Tenth, being able to carry out is quite optimal, because the Satpol PP has carried out its duties in establishing communication with the community and traders. Eleventh, the standard operating posture (SOP) is quite optimal, because the Satpol PP has a good SOP for direction and guidance to traders. Twelfth, the desire to implement is quite optimal, because the Satpol PP has enforced its regulations and regulations. The supporting factors are the desire for orderly traders and support in actions for the sustainability of street vendor activities. The inhibiting factor is incomplete communication and the lack of facilities for street vendors in the bicolor field.

Suggestions to the Regional Government of Hulu Sungai Tengah Regency are expected to increase overall socialization and provide representative and supportive facilities for street vendor activities. The Pamong Praja Police Unit is expected to increase consistency in enforcing regulations. Street vendors must maintain order, cleanliness and comfort and comply with the rules that have been set.

Keywords: *Implementation, Trader Management*

PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan non formal dengan memanfaatkan lahan terbuka dan atau tertutup, disebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya, baik menggunakan sarana atau peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan dan mudah dipindahkan, dan atau dibongkar pasang misalnya gerobak dengan dilengkapi roda.

Perdagangan kaki lima merupakan salah satu kegiatan ekonomi informal yang paling populer di wilayah perkotaan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perdagangan kaki lima juga menjadi sebuah *alternatif* pekerjaan yang cukup mudah untuk digeluti, terutama pada kalangan bawah kota. Hal ini terkait dengan cirinya yang *fleksibel* (mudah keluar masuk), modal yang dibutuhkan relative kecil, dan tidak memerlukan prosedur yang berbelit-belit. Lokasi sepanjang koridor jalan utama adalah lokasi potensial yang rentan dijadikan sebagai lokasi pedagang kaki lima (PKL), hal ini karena lokasi sepanjang koridor jalan utama merupakan lokasi strategis yang mudah dicapai oleh masyarakat.

Pedagang kaki lima kerap memanfaatkan trotoar jalan sebagai lokasi strategis untuk berjualan, sehingga keberadaan pedagang kaki lima di trotoar jalan mengakibatkan kemacetan, merusak tata ruang hijau yang telah dibuat, dan membuat kawasan menjadi kumuh. Kegiatan Pedagang kaki lima ini akan berdampak pada tergantungnya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan dan kondisi lingkungan sekitarnya.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian daerah, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Keberadaan PKL memberikan dampak positif, seperti menciptakan lapangan pekerjaan dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa dengan harga yang terjangkau. Namun, disisi lain, kehadiran PKL seringkali menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks, terutama terkait dengan pengelolaan ruang publik dan infrastruktur kota. Fenomena ini menjadi perhatian utama pemerintah daerah, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa fenomena masalah pada pengelolaan pedagang kaki lima di lapangan dwiwarna, yaitu:

1. Masih rendahnya kepatuhan pedagang kaki lima terhadap Peraturan Daerah, ditandai dengan pedagang kaki lima yang masih berjualan di area terlarang yang tidak diperuntukan untuk berjualan seperti bahu jalan, serta melanggar waktu operasional yang telah ditetapkan untuk para pedagang bejualan dari jam 04.00 sore.
2. Masih terdapat pedagang kaki lima yang tidak mengetahui dan memahami isi dan tujuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengenai tempat yang di peruntukan untuk para pedagang kaki lima berjualan.
3. Adanya sikap aparat dalam menegakkan peraturan yang cenderung kurang tegas dan tidak konsisten dapat ditemukan bahwa penertiban seringkali tidak dilakukan secara merata. Hal ini terlihat dari adanya toleransi terhadap pelanggaran kecil seperti pedagang yang masih berjualan dibawah trotoar yang menimbulkan ketidakdisiplinan pedagang.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS PKL LAPANGAN DWIWARNA)”**.

Penelitian ini penulis memfokuskan kepada beberapa aspek Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL Lapangan Dwiwarna), fokus penelitian tersebut menggunakan teori yang

dikemukakan oleh George C. Edwards III (Leo Agustino, 2016: 136) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Sikap Pelaksana
4. Struktur Birokrasi

Secara garis besar, tujuan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL Lapangan Dwiwarna).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL Lapangan Dwiwarna).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam. Artinya penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkap segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitiannya. (Anggara, 2015:21). Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan snowball sampling, peneliti memilih 10 informan untuk dijadikan sebagai sumber data peneliti. Dengan menggunakan teori implementasi menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino (2016: 136), yang meliputi: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, kesimpulan (Sugiyono, 2017). Uji kredibilitas data dinilai dengan melakukan triangulasi subjek, triangulasi waktu, triangulasi teknik (Sugiyono, 2017).

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di (Studi Kasus PKL Lapangan Dwiwarna)

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut George C. Edward III (Leo Agustino, 2016: 136-141), dimana ada 4 variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, Struktur Birokrasi. Dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Komunikasi.

Komunikasi (atau pentransmision informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakannya akan diterapkan dalam masyarakat.

- a. Sosialisasi

Sosialisasi adalah upaya menyebarluaskan isi kebijakan kepada para pelaksana dan masyarakat agar memahami tujuan dan prosedurnya. Sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan informasi kebijakan kepada para pelaksana dan pihak yang terdampak agar mereka memahami maksud, tujuan, serta prosedur pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat ini cukup optimal dalam hal penyampaian

kepada para pedagang kaki lima yang ada di lapangan dwiwarna, namun perlu ditingkatkan dengan adanya papan informasi agar penyampaian informasi dapat menyeluruh kepada para PKL.

b. Jelas

Informasi atau instruksi kebijakan harus disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Kebijakan harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, tidak menggunakan istilah teknis yang membingungkan, dan menjelaskan isi kebijakan secara lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa kejelasan mengenai pengelolaan pedagang kaki lima di lapangan dwiwarna masih kurang optimal. Karena itu komunikasi ini harus dilakukan secara menyeluruh baik kepada pedagang yang tidak tergabung dalam peguyuban ataupun pedagang yang baru berjualan di sekitar lapangan dwiwarna.

c. Tepat

Ketepatan komunikasi memastikan bahwa pesan kebijakan sampai kepada pihak yang tepat. Ketepatan komunikasi ini memastikan bahwa pesan kebijakan diterima oleh pihak yang berwenang maupun yang terdampak.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa ketepatan antar pemerintah dalam hal pengelolaan pedagang kaki lima di lapangan dwiwarna sudah berjalan dengan cukup optimal dalam penegakkan peraturan kepada para pedagang kaki lima di lapangan dwiwarna.

d. Konsisten

Kebijakan yang diterapkan harus konsisten, artinya tidak berubah-ubah tanpa alasan yang jelas dan tidak bertentangan dengan kebijakanlain. Konsistensi juga berarti bahwa pelaksanaan kebijakan tidak bersifat tebang pilih, semua pihak diperlakukan sama.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pedagang kaki lima di lapangan dwiwarna tidak konsisten atau kurang optimal dan masih memiliki beberapa kekurangan, baik dalam hal jam operasional berjualan maupun dalam hal pengawasan terhadap pedagang kaki lima.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dan sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen.

a. Staf

Implementasi membutuhkan jumlah tenaga kerja yang memadai dan memiliki kompetensi. Staf atau pelaksana harus dibekali pelatihan atau pengetahuan yang cukup agar dapat melaksanakan kebijakan secara profesional dan tidak asal-asalan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kecukupan staf Satpol PP cukup optimal dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pedagang dan dapat dikatakan mencukupi meskipun para staf hanya cenderung lebih banyak saat ada kegiatan atau acara-acara besar.

b. Informasi

Pelaksana kebijakan membutuhkan informasi yang akurat mengenai isi kebijakan, teknis pelaksanaannya, serta data lapangan. Kurangnya informasi bisa menyebabkan pelaksanaan tidak tepat sasaran, atau bahkan bertentangan dengan tujuan awal kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi cukup optimal dalam hal pengaturan waktu jam berjualan, ketertiban dan

kepatuhan para pedagang kaki lima di lapangan dwiwarna, ini menunjukkan bahwa informasi itu sudah tersampaikan dan diterima.

c. Wewenang

Pelaksana harus memiliki wewenang hukum untuk bertindak sesuai kebijakan, termasuk dalam penertiban, pengawasan, atau memberi sanksi. Tanpa wewenang yang jelas, pelaksana akan ragu-ragu atau justru melampaui batas, yang dapat menimbulkan konflik sosial atau hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan wewenang oleh Satpol PP terhadap pedagang kaki lima sudah berjalan sesuai tugas pokok dalam pengawasan rutin dan fungsinya dengan cukup tegas dan cukup optimal.

d. Fasilitas

Fasilitas merupakan penunjang operasional kebijakan, seperti sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan itu sangat mendukung dalam pelaksanaan kebijakannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan fasilitas untuk pedagang kaki lima di lapangan Dwiwarna kurang optimal, karena perlu ditingkatkan dan dievaluasi untuk memenuhi sarana dan prasarana kebutuhan seperti tenda, meja atau kursi yang layak dan untuk berkelanjutan.

3. Sikap Pelaksana

Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

a. Memahami Tugasnya

Memahami tugas yang diberikan, baik dari sisi teknis maupun tujuan kebijakan. Pelaksana juga harus memahami peran, tanggung jawab, dan tujuan kebijakan yang harus dijalankannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa aparat Satpol PP sudah memahami tugas dan tanggungjawabnya dan melaksanakan tugasnya dengan cukup optimal, sehingga menciptakan ketertiban dan kenyamanan di lapangan Dwiwarna.

b. Mampu Melaksanakan

Pelaksana memiliki kemampuan teknis dan motivasi untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan juga mampu melaksanakan kebijakan secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa para Satpol PP ini mampu melaksanakan tugasnya, menjalankannya dengan pendekatan persuasif, serta mampu menjalin komunikasi dengan pedagang dan masyarakat dengan cukup optimal.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP adalah pedoman kerja yang mengatur langkah-langkah teknis dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan SOP, pelaksana tidak bekerja berdasarkan persepsi pribadi, tetapi mengikuti standar yang sama. SOP menciptakan konsistensi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam birokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Satpol PP memiliki SOP yang jelas dalam melaksanakan tugasnya dan cukup optimal, tapi

perlu dilakukan sosialisasi dan komunikasi yang lebih baik kepada pedagang kaki lima tentang prosedur yang digunakan agar pelaksanaan SOP dapat menjadi lebih efektif.

b. Keinginan Melaksanakan

Komitmen birokrasi untuk benar-benar menjalankan kebijakan adalah kunci keberhasilan. Keinginan ini terlihat dari keseriusan dalam menyusun rencana, mengalokasikan anggaran, serta mengawasi pelaksanaan di lapangan. Tanpa niat atau komitmen yang kuat, kebijakan hanya akan berhenti di atas kertas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP melaksanakan SOP dalam melaksanakan tugasnya, baik dalam hal pelaksanaan tugasnya, menegakkan peraturan daerah maupun menertibkan pedagang kaki lima dengan cukup optimal.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di (Studi Kasus PKL Lapangan Dwiwarna)

Dalam melakukan sebuah peningkatan pasti mendapatkan suatu hambatan atau kendala. Berikut ini hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di (Studi Kasus PKL Lapangan Dwiwarna).

1. Faktor Pendukung

Dalam sebuah penelitian tentunya ada hal-hal yang mendukung hasil penelitian tersebut dan ada juga faktor-faktor pendukung. Berikut ini akan dijelaskan tentang faktor-faktor pendukung dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL Lapangan Dwiwarna).

a. Keinginan untuk Tertib Pedagang

Pedagang kaki lima menunjukkan keinginan untuk menjaga ketertiban dan mengikuti aturan yang telah disepakati bersama, terutama melalui koordinasi dengan paguyuban. Hal ini tercermin dari penataan lapak yang relatif teratur dan tidak mengganggu fasilitas umum seperti trotoar dan akses jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara pedagang, masyarakat, dan pemerintah terlihat cukup baik dan menjadi faktor pendukung utama dalam menciptakan suasana yang tertib, aman, dan mendukung keberlanjutan usaha para pedagang kaki lima di wilayah tersebut.

b. Dukungan dalam Tindakan

Terdapat keterlibatan aktif dari Satpol PP dalam mengawasi dan menegakkan ketertiban berdasarkan kesepakatan yang telah disusun bersama paguyuban pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa terdapat sinergi yang baik antara pemerintah, khususnya Satpol PP, dengan pedagang kaki lima di Lapangan Dwiwarna dalam menjalankan pengelolaan berdasarkan tindakan yang ada. Hal ini berperan penting dalam menciptakan kondisi yang tertib, teratur, dan mendukung keberlangsungan aktivitas pedagang kaki lima di kawasan tersebut.

2. Faktor Penghambat

Dalam sebuah penelitian tentunya ada hal-hal yang mendukung hasil penelitian tersebut dan ada juga faktor-faktor penghambatnya. Berikut ini akan dijelaskan tentang faktor-faktor penghambat dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL Lapangan Dwiwarna).

a. Komunikasi Tidak Menyeluruh

Komunikasi yang tidak menyeluruh serta lemahnya penegakan aturan dan kurangnya koordinasi, yang berimplikasi pada rendahnya tingkat kepatuhan pedagang terhadap peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang tidak menyeluruh dalam menegakkan aturan juga keterbatasan fasilitas dasar merupakan aspek yang menghambat efektivitas penataan pedagang kaki lima di lapangan dwiwarna.

b. Minimnya Fasilitas

Fasilitas yang tersedia bagi PKL masih sangat minim, sehingga banyak pedagang yang berjualan menggunakan peralatan sendiri. Beberapa area berjualan memang telah disediakan tempat khusus, namun tidak seluruhnya tertata dengan baik dan belum dilengkapi sarana pendukung yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa kurangnya fasilitas, minimnya alokasi anggaran, dan rendahnya kesadaran hukum menjadi faktor utama yang menghambat penataan PKL secara tertib dan berkelanjutan. Kondisi di lapangan ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan peningkatan fasilitas dan pengelolaan yang lebih serius agar keberadaan PKL tidak mengganggu ketertiban umum namun tetap dapat menjalankan aktivitas ekonominya secara layak.

SIMPULAN

Dari hasil kegiatan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di (Studi Kasus Lapangan Dwiwarna) yang telah peneliti lakukan setidaknya dapat disimpulkan yaitu: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di (Studi Kasus Lapangan Dwiwarna) disimpulkan cukup optimal, hal tersebut dapat dilihat pada aspek: komunikasi adapun indikator *Pertama*, sosialisasi cukup optimal, karena sudah tersosialisasikan kepada PKL. *Kedua*, jelas kurang optimal, karena penyampaian informasi tidak menyeluruh. *Ketiga*, tepat cukup optimal, karena sudah berjalan dalam penegakan peraturan. *Keempat*, konsisten kurang optimal, karena penyampaian jam operasional dan pengawasan tidak konsisten. Pada aspek: sumber daya meliputi indikator *Kelima*, staf cukup optimal, karena dalam pelaksanaannya sudah tercukupi. *Keenam*, informasi sudah cukup optimal, karena tersampaiakannya dalam hal ketertiban dan kepatuhan. *Ketujuh*, wewenang sudah cukup optimal, karena pelaksanaannya sudah berjalan sesuai tugas pokoknya. *Kedelapan*, fasilitas kurang optimal, dalam hal saran dan prasarana kebutuhan seperti tenda. Pada aspek: sikap pelaksana meliputi indikator *Kesembilan*, memahami tugasnya cukup optimal, karena satpol PP sudah memahami dan melaksanakan tugasnya dengan baik. *Kesepuluh*, mampu melaksanakan sudah cukup optimal, karena satpol PP sudah menjalankan tugasnya dalam menjalin komunikasi kepada masyarakat dan pedagang. Pada aspek: struktur birokrasi meliputi indikator *Kesebelas*, standar operasional prosedur (SOP) sudah cukup optimal, karena satpol PP memiliki SOP yang baik untuk pengarah dan pembinaan kepada pedagang. *Keduabelas*, keinginan melaksanakan sudah cukup optimal, karena satpol PP sudah menegakkan peraturan maupun penertibannya.

Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL Lapangan

Dwiwarna), yaitu:

- a. Faktor penghambat yaitu komunikasi yang tidak menyeluruh membuat pedagang yang ada di lapangan tidak mematuhi terhadap peraturan yang berlaku dan fasilitas yang tersedia bagi PKL masih sangat minim, sehingga banyak pedagang yang berjualan menggunakan peralatan sendiri.
- b. Faktor pendukung yaitu keinginan para pedagang untuk tertib dalam menciptakan suasana yang aman dan tertib, dukungan dalam tindakan telah berfungsi dalam keberlangsungan aktivitas PKL secara tertib dan terarah, dan akses listrik untuk penerangan mampu memberikan pengawasan yang ada untuk kelancaran dan keamanan berjualan.

Penulis menyarankan kepada pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini berdasarkan hasil yang ditunjukkan tersebut, antara lain:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah diharapkan untuk meningkatkan upaya sosialisasi Perda No. 11 Tahun 2013 secara menyeluruh kepada seluruh pedagang kaki lima, baik yang tergabung dalam paguyuban maupun tidak, serta kepada masyarakat umum agar pemahaman terhadap aturan menjadi merata. Perlu adanya penguatan sistem komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha PKL, terutama dalam penyampaian informasi yang tepat sasaran dan mudah dipahami. Menyediakan fasilitas yang lebih representatif dan berkelanjutan untuk mendukung kenyamanan dan ketertiban aktivitas PKL di Lapangan Dwiwarna.
2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diharapkan untuk meningkatkan konsistensi dalam penegakan peraturan, baik dari segi waktu, pendekatan, maupun intensitas, agar tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha PKL. Perlu memperluas pendekatan persuasif dan edukatif kepada para pedagang, tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan pemahaman secara humanis dan berkelanjutan. Juga melibatkan pedagang dalam diskusi dan evaluasi SOP, agar mereka memahami mekanisme yang dijalankan dan dapat turut serta menjaga ketertiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Maharani Kartini, 2019. "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan)", (Skripsi), Universitas FISIP UPN.
- Adisasmata, Rahardjo. 2015. *Analisis Kebijakan Publik. Graha Ilmu*. Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Edisi Revisi, Alfabeta: Bandung.
- Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.
- Anggara, S. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. CV Pustaka Setia.
- BPK RI, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, Barabai.
- Dewi, Diana Suluh Kusuma. 2022. *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Samudra Biru: Yogyakarta.
- Herdiana, Dian. 2018. *Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar*. ResearchGate: Bandung (article).



- Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) 'Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Administratus*, 9(2), pp. 26–33.
- Iriawan, Hermanu. 2024. *Teori Kebijakan Publik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup: Malang.
- Marwiyah, Siti. 2022. *Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis, dan Evaluasi Kebijakan Publik*. CV MITRA ILMU. Jember.
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. UNISRI Press: Surakarta.
- Ramadhan, Syahril. 2024. *Implementasi Kebijakan Publik (FINIS LAYOUT)*. PT. Media Penerbit Indonesia, Royal Suite: Medan.
- Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.
- Setiawan, Muhamad Nurul. 2024. *Konsep Kebijakan Publik*. UMKO Publishing: Lampung.
- Situmorang, Chazali H, 2016. *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Social Security Development Institute (SSDI). Depok.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Tim Penyusun, 2018. *Pedoman Penyusunan Skripsi STIA Amuntai*.
- Tresana, Novita. 2021. *Implementasi Kebijakan Publik; Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi*. Suluh Media: Yogyakarta.
- Yunita Anastasia Anin, Budi Setiawati, Siti Arbayah, 2020 "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 39 Tentang Penertiban PKL Dilihat Dari Aspek Komunikasi Di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah", (Skripsi), Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong.